

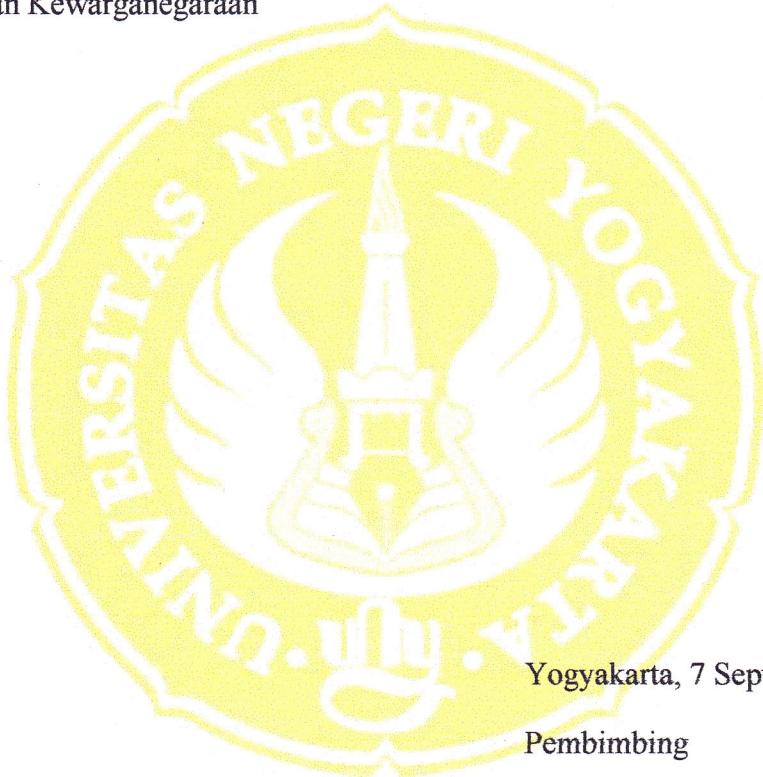
LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunungkidul oleh Pemerintah Daerah Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten

Nama : Nuri Hartono

NIM : 10401241017

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 7 September 2017

Reviewer

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. H." followed by a stylized surname.

Dr. Suharno, M.Si

NIP.19680417 200003 1 001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Sunarso" followed by a stylized surname.

Dr. Sunarso, M.Si

NIP. 19600521 198702 1 004

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ZONA UTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI OBJEK WISATA EMBUNG BATARA SRITEN

Nuri Hartono

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY
nuri.hartono@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, meliputi 3 (tiga) tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wisata zona utara melalui objek wisata Embung Batara Sriten difokuskan pada 4 hal yaitu pengembangan daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana, pembangunan aksesibilitas dan transportasi serta pemberdayaan masyarakat. Empat hal ini menjadi prioritas utama mengingat banyaknya hal yang tidak bisa diupayakan dalam waktu dekat ini karena pariwisata adalah *multiefek player*. Yakni sebuah sektor yang berpengaruh pada banyak sektor yang lain. 2). Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui objek wisata Embung Batara Sriten yaitu aksesibilitas atau jalan yang rusak dan belum layak menjadi penghalang dan momok bagi para wisatawan dan masyarakat Sriten untuk melakukan mobilitas. Kendala yang lain yaitu masih minim dan rendahnya pengetahuan serta *skill* tentang kegiatan dan tata kelola kepariwisataan yang dimiliki oleh pengelola maupun masyarakat di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berdampak pada tingkat kemajuan pengembangan wisata di objek wisata Embung Batara Sriten ataupun di kawasan wisata zona utara..

Kata Kunci: *kebijakan, pengembangan, zona utara, pemerintah daerah, Embung Batara Sriten*

THE DEVELOPING OF POLICY OF TOURISM RESORT IN THE NORTH PART OF GUNUNGKIDUL REGENCY BY THE GOVERMENT TERRITORY EMBUNG BATARA SRITEN

ABSTRACT

This research aims to reveal how is the policy of tourism resort in the north part of Gunungkidul Regency by the government territory through Embung Batara Sriten tourism object. This is a descriptive research with qualitative approach. The technique in determining the research subjects is purposive techniques, while the data collection techniques using interviews and documentation. The researcher used cross check technique to ensure the accuracy of the data. As the data analysis techniques, the researcher using inductive data analysis, which includes 3 (three) stages: data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research showed that: 1) The policy done by the government territory in the developing tourism resort in the north part through Embung Batara Sriten tourism object focus on four matter ; the attraction of tourism object, the developing of mears and infrastructure, the establisment of acces, the transportation and empowerment society. The fourth matter become the prime priority because there are many efforts in the recent time and tourism resort is multiefek player. 2) The problem from the government territory in the developing of policy of tourism resort in the north part of Gunungkidul Regency through Embung Batara Sriten tourism object is the acces or the damage roads, and unsuitable, became obstacle to tourist and Sriten society to mobility. The other problem is the minimum and the low of knowledge and skill about activity and management system of tourism by the manager and society in the north part of Gunungkidul Regency. It has impact in the advancement degree in the developing of Embung Batara Sriten tourism object in the north part of Gunungkidul Regency.

Keywords: *policy, developing, north part, government territory, Embung Batara Sriten*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini mengandung pernyataan bahwa apa yang dimiliki oleh bangsa dengan semua potensi kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya, sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai alat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan berbagai sumber daya yang ada, tanah, air dan mineral yang dimiliki oleh bangsa ini, perekonomian dapat digerakkan dan dijalankan untuk mencapai kemakmuran. Lain daripada itu, satu hal yang penting juga untuk

diperhatikan guna mencapai capaian ke arah tersebut, dalam Pasal 33 ayat (3) juga mengandung pernyataan bahwa diharuskannya ada pihak yang menguasai kekayaan alam itu, menguasai dalam arti mengelola, mengolah dan mengembangkan, yang dalam hal ini adalah negara sebagai pihak yang berhak dan pantas untuk menguasainya. Dengan begitu kemakmuran nanti akan tercapai dengan sendirinya melalui roda ekonomi nasional melalui penguasaan aset dan sumber daya oleh negara sebagai pihak pengelola, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lanjutan, Pasal 33 ayat (4)

UUD 1945 yang berbunyi : perekonomian nasional diselenggarakan oleh negara berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hadirnya negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dapat menentukan besaran jumlah pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sektor. Dari sektor yang ada,

migas, pertanian, pariwisata dan lain-lain, negara dapat membandingkan potensi penerimaan pendapatan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Adapun dari ketiga sektor tersebut, sejauh ini sektor migas masih menjadi tumpuan utama dari pendapatan negara. Namun dari beberapa kajian yang terus berkembang, kekhawatiran akan semakin menipisnya cadangan sumber daya migas memaksa negara untuk berimprovisasi dalam mengenjot pendapatan negara dengan meningkatkan sektor lain yang sekiranya menjadi alternatif atau model baru guna memenuhi perekonomian nasional.

Dari sektor-sektor yang ada, salah satu yang berpotensi dan bisa menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional yaitu sektor Pariwisata. Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, sebagaimana disebutkan dalam Janianton Damanik (2005: 49), sektor pariwisata cenderung dilihat sebagai salah satu sumber devisa dan sumber pendapatan yang akan meningkatkan *saving ratio* yang diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata dengan daya tarik keindahan

alam Indonesia tentu sangat berpotensi untuk menarik wisata entah itu domestik maupun mancanegara.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah (Oka A. Yoeti, 2008: 20-21)

Terkait perihal pengembangan pariwisata, sejauh ini pemerintah baik pusat maupun daerah telah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah. Meskipun secara umum terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal tersebut selain dikarenakan oleh alokasi dana daerah juga karena perbedaan topografi dan bentang alam yang ada di Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Oleh karena itu dalam hal ini

Pemerintah daerah diharapkan kreatif dan mampu berimprovisasi guna mengembangkan pariwisatanya.

Selo Sumardjan dalam James J Spilane (1987: 133) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diprooleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas pelbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat disangkal

bahwa hampir di seluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur, dan sarana sarana pariwisata yang menuju ke dan terdapat di daerah tersebut. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi pokok persoalan. Mengembangkan kesemuanya secara simultan tidak mungkin karena untuk itu diperlukan biaya yang besar, padahal dana yang tersedia terbatas, karena itu pengembangan pariwisata haruslah berdasarkan skala prioritas (James J Spilane, 1987 :133)

Apa yang dijelaskan oleh Selo Sumardjan terkait pengembangan pariwisata nampaknya senada dengan apa yang tengah di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dewasa ini. Upaya pengembangan wisata lebih jauh telah sampai pada tahap pemerataan daerah wisata. Hal ini dilakukan mengingat selama ini pembangunan hanya terfokus pada kawasan wisata pantai di daerah selatan Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, langkah pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul

nampaknya tepat, seperti yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Supriyadi. Dinyatakan olehnya bahwa pembangunan kawasan wisata zona utara dilakukan untuk menghindari ketimpangan.

Lebih jauh pengembangan wisata oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini dapat dipastikan akan dilaksanakan dengan serius, mengingat apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada awal tahun ini yaitu mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2020. Oleh karena itu, salah satu upaya pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui pembangunan objek wisata embung bathara Sriten dirasa cukup menarik. Mengingat tantangan yang ada terkait infrastruktur dan promosi oleh Pemerintah daerah selama ini dirasa belum maksimal.

Dari uraian di atas, maka perlu untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan

oleh pemerintah daerah guna mengoptimalkan objek wisata Embung Batara Sriten, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul. Apa-apa yang menjadi kendala dalam kebijakan pengembangan objek wisata tersebut juga menarik untuk dikaji lebih dalam, demi tercapainya keberhasilan pengembangan wisata zona utara dan terwujudnya visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menjadikan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya tahun 2020.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada belum diketahui dengan jelas kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten dan kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sritenn. Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, “bagaimana tingkat toleransi

antarumat beragama di Kabupaten Gunungkidul?”, “bagaimana kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sritenn?”, “apa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam kebijakannya mengembangkan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui objek wisata Embung Batara Sriten?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sritenn.

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak atau berkeliling, sedangkan *wisata* berarti pergi atau bepergian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan

yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan dalam undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengertian yang lain dijelaskan oleh para pakar diantaranya yaitu menurut Robert McIntosh bersama Shashikant Gupta. Dua orang ini mencoba mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya (Nyoman S Pendit, 1994: 36).

Menurut Robert Eyestone, definisi dari kebijakan publik secara luas yaitu sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini jika dilihat masih belum mempunyai arti yang pasti dan khusus karena masih mencakup banyak hal. Batasan lain mengenai pengertian kebijakan publik

disampaikan oleh Thomas R. Dye. Dikatakannya bahwa kebijakan publik yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsep ini pun dirasa masih belum bisa menjelaskan secara detail, karena tidak adanya pembedaan yang jelas antara yang harus diputuskan dan tidak diputuskan oleh pemerintah. Pengertian yang cukup komprehensif disampaikan oleh Carl Friedrich. Ia memandang bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Budi Winarno, 2014: 20-21)

Kebijakan Pengembangan pariwisata oleh pemerintah setidaknya harus dititik beratkan pada 7 (tujuh) hal, yang oleh Gamal Suwantoro (1997: 45-48) disebut sebagai Sapta Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata. Adapun ketujuh hal tersebut yaitu :

1. Promosi

Promosi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan upaya pemasaran. Promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Aksebilitas

Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pengembangan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral.

3. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam mengembangkan pariwisata. Selain itu untuk memperbesar dampak positif pembangunan juga mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan.

4. Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan salah satu jenis produk wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Jenis wisata ini memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi terhadap produk wisata sejenis di luar negeri.

5. Produk Wisata

Upaya untuk menampilkan produk wisata yang bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia ini harus memiliki keahlian dan ketrampilan yang diperlukan untuk memberikan jasa pelayanan pariwisata.

7. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Kampanye nasional sadar wisata pada hakikatnya adalah upaya memasyarakatkan sapta pesona yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai kebijakan pengembangan kawasan

wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam kebijakannya mengembangkan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui objek wisata Embung Batara Sriten.

Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, pemerintah Desa Pilangrejo Nglipar dan Pokdarwis Batara Sriten. Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi dua orang pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, satu orang pejabat di Pemerintah Desa Pilangrejo Nglipar dan satu orang pengurus Pokdarwis Batara Sriten.

Teknik yang digunakan dalam oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, dimana dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan garis besar pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Dokumentasi dalam

penelitian ini menggunakan berbagai arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, berbagai peraturan daerah dan peraturan Bupati Gunungkidul yang berkaitan dengan kepariwisataan dan dokumen pendukung lainnya.

Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*, pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif. Merujuk pada analisis data kualitatif model Miles dan Hibermas (Sugiyono, 2013: 334-343), berdasarkan model tersebut ada tiga langkah dalam melakukan analisis data yaitu; a) Data *reduction* (Reduksi data), b) Data *display* (Penyajian data), c) *Conclusion drawing/verification* (Verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunungkidul oleh Pemerintah Daerah Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten

Sampai sejauh ini, kebijakan pemerintah daerah guna menunjang kemajuan pengembangan kawasan wisata Embung Batara Sriten yakni dititik beratkan pada 4 strategi diantaranya yaitu : pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan transportasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan. Keempat bidang inilah yang menjadi strategi kebijakan Pemerintah daerah, meningat sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh daerah. Karena itu, prioritas menjadi sangatlah penting bagi tercapainya kebijakan pengembangan kawasan wisata.

a. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini yaitu dengan langkah menyusun Design Engineering Detail (DED) yang

berisi konsep pembangunan wisata perpaduan antara potensi, daya tarik dan keinginan masyarakat. Embung Batara Sriten sendiri telah masuk dalam RIPARDA dimana objek ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata (KSP) VI. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna membangun daya tarik yaitu dengan melakukan promosi melalui berbagai sarana dan media. Diantaranya yaitu leflet, buku-buku pariwisata Gunungkidul. Menerima kunjungan dan study banding dari daerah lain, dan juga promosi melalui media elektronik stasiun televisi.

b. Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Pariwisata

Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang selanjutnya disebut fasilitas kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, saarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktititas kehidupan

keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam kunjungan ke destinasi pariwisata.

Kebijakan Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung sangat berpengaruh dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi bertambahnya daya tarik objek wisata. Dengan adanya fasilitas pendukung maka besaran retribusi yang ditetapkan oleh pihak pengelola menjadi harga yang pantas bagi wisatawan untuk menikmatinya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah telah melakukan beberapa pembangunan dan pemberian stimulan kepada pemerintah desa atau kelompok masyarakat untuk pengembangan lebih lanjut. Diantaranya yang dapat dilihat dan dirasakan yaitu adanya beberapa fasilitas rambu penunjuk arah, gapura di pintu masuk kawasan wisata, dan beberapa fasilitas pendukung di embung Batara Sriten seperti gazebo, pembangunan anak tangga dan lainnya.

c. Pembangunan Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Akses merupakan bagian terpenting dalam sebuah industri pariwisata. Untuk menjadikan suatu kawasan wisata ramai dikunjungi, faktor akses atau jalan sangatlah menjadi penentu bagi minat kunjungan wisatawan. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini telah dilakukan dengan penetapan dan pembangunan fasilitas pada lima pintu masuk willyah Gunungkidul, dimana 3 dari 5 titik tersebut berada di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul. Kelima titik tersebut yaitu :

- 1) Pintu masuk Purwosari (selatan)
- 2) Pintu masuk Patuk (utara)
- 3) Pintu masuk Ngawen (utara)
- 4) Pintu masuk Semin (utara)
- 5) Pintu masuk Rongkop (selatan)

Untuk di Sriten sendiri, perhatian pemerintah daerah terhadap akses atau jalan menuju lokasi embung telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan

Dinas Pekerjaan Umum terkait pembangunan dan pelebaran jalan. Dimana status jalan yang berada di Desa Pilangrejo nantinya akan diubah dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Untuk melakukan ini tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ukuran jalan yang harus memenuhi kriteria dengan lebar 4-6 meter dan bahu jalan 1 meter.

Pada akses setelah pintu masuk dari Pilangrejo menuju puncak yang berjarak 7,5 km, pokdarwis dan masyarakat telah berkontribusi dalam upaya pelebaran jalan tanpa harus melakukan pembebasan tanah warga. Hal ini merupakan keinginan, keikhlasan dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya akses sebagai urat nadi bagi mobilitas dan roda perekonomian desa. Karena itu, kebijakan permerintah daerah untuk mengimbangi kesadaran warga tersebut yaitu dengan merencanakan pembangunan jalan cor blok untuk sementara waktu dan pengerasan aspal untuk tahun mendatang. Untuk saat ini, jalan ataupun akses yang ada masih tergolong buruk dan kurang layak untuk dilalui sebagai jalur wisata.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata Embung Batara Sriten yaitu dengan melaksanakan pertemuan dengan pokdarwis dan masyarakat dengan agenda yakni sosialisasi, pelatihan dan bimbingan serta pendampingan. Agenda tersebut secara rutin dilakukan oleh pemda dengan intensitas kurang lebih 3 bulan sekali, dimana kunjungan terakhir pemerintah daerah atau dinas pariwisata dilaksanakan di bulan Juni tahun 2017. Dalam kegiatan ini Pemerintah daerah lebih banyak memberikan pelatihan seperti pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan hasil retribusi dan promosi daerah wisata.

Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunungkidul

Melalui Objek Wisata Embung

Batara Sriten

Berdirinya objek wisata Embung Batara Sriten seperti yang sudah ada saat ini bukanlah tujuan utama dari awal dibangunnya embung tersebut. Munculnya objek ini sebagai destinasi wisata adalah sebuah efek dari peluang yang dimiliki oleh Embung Batara Sriten akan daya tarik dan keindahan alamnya. Karena itu, hambatan dan kendala yang ditemui sejak dijadikannya embung tersebut sebagai objek wisata sampai saat ini masih sulit untuk diatasi. Kendala yang paling serius adalah terkait infrastuktur dan aksesibilitas. Sebagai kawasan dengan predikat puncak tertinggi di Gunungkidul. Akses menuju lokasi wisata tersebut tentu tidak mudah untuk dilalui. Terlebih lagi kondisi jalan yang rusak dan jauh dari kesan layak seperti jalan-jalan di kota Gunungkidul menjadi momok dan memberikan kesan negatif yang terstigma bagi objek wisata Embung Batara Sriten ini. Hanya kendaraan tertentu yang bisa mengakses jalan untuk menuju lokasi seperti sepeda motor, mobil besar dan truk. Hal ini

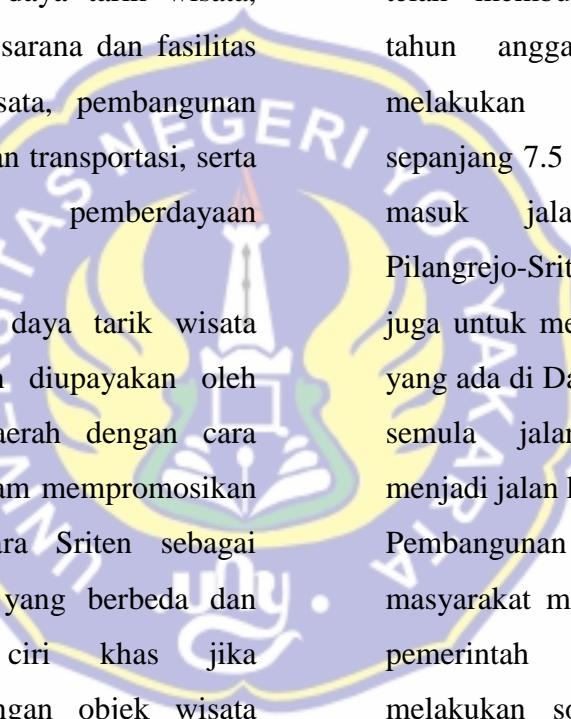
tentu mengurangi daya tarik wisatawan untuk merubah minatnya.

Apa yang menjadi kendala terkait akses tersebut menyebabkan masih minimnya jumlah pengunjung dan wisatawan. Karena itu merupakan prioritas bagi pemerintah daerah dan pengelola untuk mengupayakan perbaikan dan pembangunan jalan.

Kendala yang lain terkait kebijakan pengembangan dan pembangunan wisata yaitu masih minimnya kemampuan dan skill yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan wisata dikarenakan masih awamnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kegiatan kepariwisataan. Hal ini sebagai efek dari kegiatan kepariwisataan yang relatif baru untuk masyarakat di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten, yakni sebagai berikut.

- 
1. Kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul dengan menjadikan Embung Batara Sriten sebagai objek wisata pengungkit dilakukan pemerintah daerah dengan memfokuskan pada 4 pendekatan pembangunan, yaitu : pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan fasilitas umum pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan transportasi, serta pembangunan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daya tarik wisata dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah daerah dengan cara lebih aktif dalam mempromosikan Embung Batara Sriten sebagai objek wisata yang berbeda dan mempunyai ciri khas jika dibanding dengan objek wisata yang lain. pemerintah sudah melakukan upaya promosi melalui berbagai media yang salah satunya yaitu melalui media elektronik televisi swasta nasional yakni Metro TV di setiap harinya. Kebijakan pembangunan sarana dan fasilitas umum pariwisata dilakukan dengan membangun beberapa fasilitas pendukung di lokasi Embung Batara Sriten seperti gazebo, anak tangga dan landasan untuk olahraga paralayang. Untuk kebijakan pembangunan aksesibilitas dan transportasi, Pemerintah daerah telah membuat perencanaan di tahun anggaran 2018 untuk melakukan perbaikan jalan sepanjang 7.5 km mulai dari pintu masuk jalan Balai Desa Pilangrejo-Sriten. Direncanakan juga untuk mengubah status jalan yang ada di Daerah Pilangrejo dari semula jalan desa nantinya menjadi jalan kabupaten. Pembangunan pemberdayaan masyarakat masih dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan kepada Pokdarwis Batara Sriten dan masyarakat guna lebih aktif dan kreatif dalam mengelola objek wisata yang ada
 2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangkan kawasan wisata zona utara melalui

objek wisata Embung Batara Sriten yaitu akses atau jalan yang masih sulit untuk dilewati atau ditempuh. Mengingat lokasi Embung Batara Sriten yang berada di puncak bukit di Dusun Sriten, yang mana jarak dari pintu masuk dan dari jalan utama desa tergolong cukup jauh yakni sepanjang 7.5 km dengan kondisi jalan yang rusak, terjal dan berliku sehingga menjadi hambatan dan momok tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung, juga bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas dan mobilitas. Kendala yang lain terkait kebijakan pengembangan dan pembangunan wisata yaitu masih minimnya kemampuan dan skill yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan wisata dikarenakan masih awamnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kegiatan kepariwisataan. Hal ini sebagai efek dari kegiatan kepariwisataan yang relatif baru untuk masyarakat di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata : Dari Konsep Menuju Implementasi*. Yogyakarta : Keppel Press
- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradnya Paramita..
- Spilane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius (Anggota Ikapi).
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Winanrno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : teori, Proses dan Study Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata : Introduksi, Informasi dan Implementasi*. Jakarta : Penerbit Kompas